

**BAB V. LEMBAR DATA KUALIFIKASI (LDK)**

HAL	NOMOR IKP	KETENTUAN DAN INFORMASI SPESIFIK
Persyaratan Kualifikasi	29.11	<p>Persyaratan kualifikasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang Jasa Konstruksi.</li> <li>2. Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Kecil yang masih berlaku, serta disyaratkan sub bidang klasifikasi/ layanan sub klasifikasi <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hunian Tunggal dan Kopel (BG001) dengan kode KBLI – 41011; <b>atau</b></li> <li>• Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Hotel, Restoran dan Bangunan Serupa Lainnya (BG006) dengan kode KBLI-41017; <b>atau</b></li> <li>• Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Gedung Lainnya (BG009) dengan kode KBLI – 41019.</li> </ul> </li> <li>3. Memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.</li> <li>4. Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP), dengan ketentuan:  <math>SKP = KP - P</math>, dimana                      KP adalah nilai Kemampuan Paket, dengan ketentuan untuk Usaha Kecil, nilai Kemampuan Paket (KP) ditentukan sebanyak 5 (lima) paket pekerjaan</li> <li>5. Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp2.500.000.000,00 (<i>dua miliar lima ratus juta rupiah</i>) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (<i>lima belas miliar rupiah</i>).</li> </ul> </li> <li>6. Nomor NPWP dengan status keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak valid;</li> <li>7. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);</li> <li>8. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;</li> </ol>